

# BERITA RESMI STATISTIK



## Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau Tahun 2017

IDI Provinsi Riau  
Tahun 2017  
sebesar 73,41  
mengalami  
kenaikan  
dibandingkan  
Tahun 2016  
sebesar 71,89

- IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).
- Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) *review* surat kabar lokal, (2) *review* dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion (FGD)*, dan (4) wawancara mendalam.
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau 2017 mencapai angka 73,41 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 71,89. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. \*)
- Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau dari tahun 2016 ke tahun 2017 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang naik 10,25 poin (dari 71,78 menjadi 82,03), (2) Hak-Hak Politik yang turun 11,41 poin (dari 77,98 menjadi 66,57), sedangkan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi Naik 11,07 poin (dari 62,34 menjadi 73,41).

\*) Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

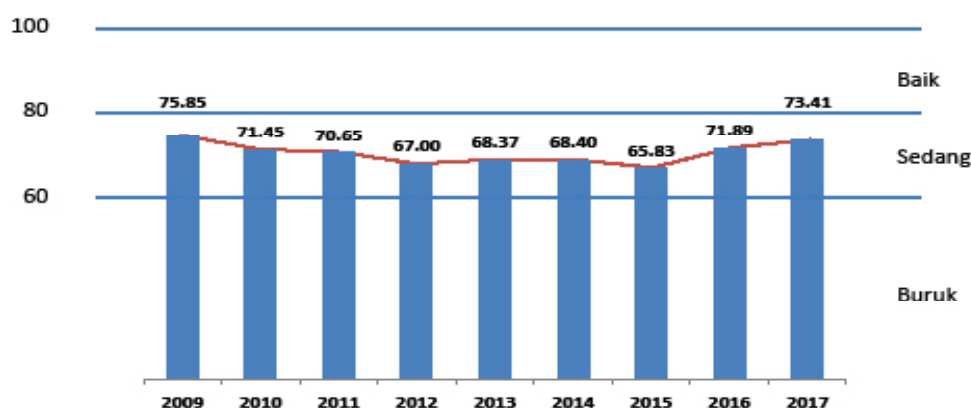
## 1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2016 Provinsi Riau

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau tahun 2017 mencapai 73,41 (dalam skala indeks 0 sampai 100). Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI 2016 yang capaiannya sebesar 71,89. Meskipun cukup banyak mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Provinsi Riau sebesar 75,85 kemudian angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 67,00 di tahun 2012. IDI Provinsi Riau kemudian mengalami kenaikan hingga sebesar 68,40 pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 65,83 dan kemudian terus mengalami kenaikan dan menjadi sebesar 73,41 di tahun 2017.

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Riau. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

**Grafik 1**  
**Perkembangan IDI Provinsi Riau, 2009-2017**

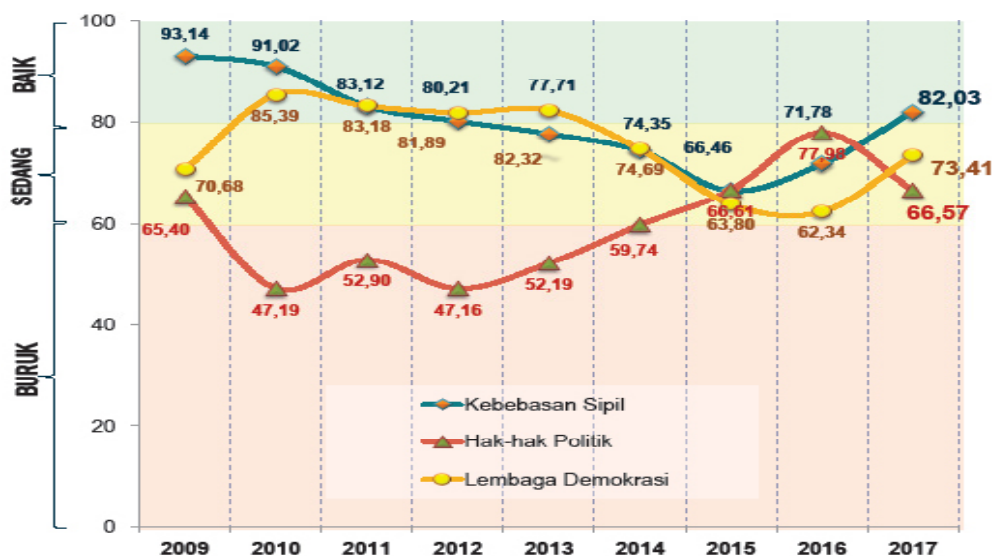


## 2. Perkembangan Indeks Aspek-aspek IDI Provinsi Riau

Angka IDI 2017 Provinsi Riau merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 82,03; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 66,57; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 73,41.

Pada tahun 2017, terdapat 5 indikator dalam aspek Kebebasan Sipil yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Meskipun mengalami kenaikan, aspek Kebebasan Sipil menunjukkan kecenderungan *trend* yang semakin menurun. Sementara itu, aspek Hak Politik mengalami penurunan yang cukup tajam dengan nilai terendah sedangkan aspek Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan yang tertinggi dibandingkan aspek lainnya.

**Grafik 2**  
**Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi riu, 2009-2017**



Indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami kenaikan 10,25 poin dibandingkan tahun 2016. Sedangkan, nilai indeks aspek Hak-Hak Politik mengalami penurunan 11,41 poin dibandingkan tahun 2016, sementara itu nilai aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan sebesar 11,07 poin dibandingkan tahun 2016 yang merupakan kenaikan nilai tertinggi.

Serupa dengan tahun 2016, pada tahun 2017 tidak ada indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik masih tetap pada kategori “sedang”, sedangkan aspek Lembaga Demokrasi berubah menjadi kategori “baik”.

### 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Riau

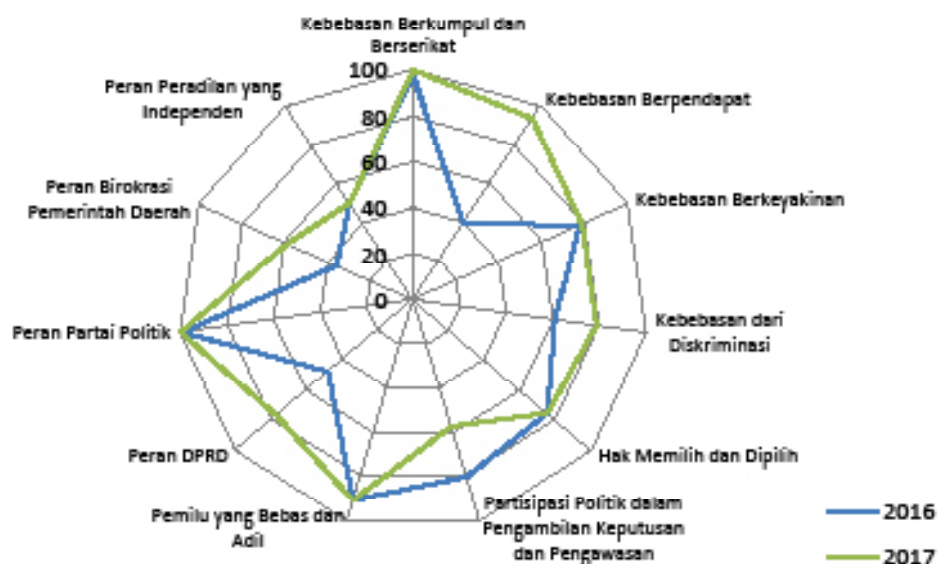
Pada tahun 2017 terdapat tujuh variabel yang mengalami kenaikan indeks, satu variabel yang mengalami penurunan dan tiga variabel tidak mengalami perubahan. Dari tujuh variabel yang mengalami kenaikan, tiga di antaranya mengalami kenaikan cukup tinggi, antara lain : Peran Kebebasan Berpendapat, Peran DPRD, dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.

Variabel Peran Kebebasan Berpendapat mengalami kenaikan paling tinggi yaitu sebesar 54,15 poin, dari 39,59 pada 2016 menjadi 93,74 pada 2017. Hal ini disebabkan tidak adanya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat di Provinsi Riau sepanjang tahun 2017.

Kenaikan tertinggi kedua terjadi pada variabel Peran DPRD yang naik 29,10 poin, dari 47,96 pada 2016 menjadi 77,06 pada 2017. Nilai alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD Provinsi Riau Tahun 2017 masing-masing sebesar 19,5 persen dan 9,15 persen. Hal ini sudah hampir mendekati persentase alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa Pemerintah Provinsi harus mengalokasikan dana APBDnya sebesar 20 Persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan. Selain itu, selama tahun 2017, DPRD Provinsi Riau telah mengeluarkan Rekomendasi kepada eksekutif sebanyak 19 rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Selanjutnya kenaikan tertinggi ketiga sebesar 22,85 poin terjadi pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai 58,70 pada 2017 dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 35,85. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN sebanyak 8 perkara yang dikabulkan. Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang sebanyak 14 perkara.

**Grafik 3**  
**Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Riau, 2016-2017**



Di sisi lain, variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan menurun cukup tajam sebesar 22,82 poin, dari 80,43 pada 2016 menjadi 57,61 pada 2017 menurun dari kategori “baik” menjadi kategori “buruk”. Selama tahun 2017, di Provinsi Riau banyak terjadi demonstrasi yang bersifat kekerasan. Warga Riau yang mengeluhkan karena jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki, sehingga masyarakat berinisiatif untuk melakukan demonstrasi dengan menanam pisang dan atau menutupnya dengan timbunan sampah untuk menutup jalan yang rusak. Demonstrasi juga banyak dilakukan oleh mahasiswa terkait kebijakan di kampusnya atau terkait kinerja pemerintahan Provinsi Riau.

Variabel lain yang tidak mengalami perubahan adalah variabel Hak Memilih dan Dipilih (kategori “sedang”), Pemilu yang Bebas dan Adil (kategori “baik”) dan Peran Peradilan yang Independen (kategori “buruk”). Angka perkembangan variabel indeks IDI Provinsi Riau tahun 2016 dan 2017 secara rinci dapat dilihat pada Grafik 3.

#### 4. Perkembangan Skor Indikator IDI Provinsi Riau

Pada tahun 2017 dari 28 indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagaimana dapat dicermati pada keterangan berikut ini.

- Terdapat 14 indikator yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi:
  - a. Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat;

- b. Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat;
  - c. Indikator 3, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat;
  - d. Indikator 7, Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari satu Kelompok Masyarakat terhadap Kelompok Masyarakat Lain terkait dengan Ajaran Agama;
  - e. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat Pemerintah Daerah yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis atau terhadap dan Kelompok Rentan lainnya;
  - f. Indikator 11, Kejadian dimana Hak Memilih atau Dipilih Masyarakat Terhambat;
  - g. Indikator 15, Persentase Anggota Perempuan DPRD Provinsi;
  - h. Indikator 17, Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - i. Indikator 18, Kejadian yang Menunjukkan Keberpihakan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu;
  - j. Indikator 19, Kejadian atau Pelaporan tentang Kecurangan dalam Penghitungan Suara;
  - k. Indikator 20, Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Total APBD;
  - l. Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang dilakukan Parpol Peserta Pemilu;
  - m. Indikator 24, Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Parpol Tingkat Provinsi;
  - n. Indikator 27, Keputusan Hakim yang Kontroversial.
- Terdapat 9 indikator yang berada pada kinerja kategori “sedang” (skor 60-80), meliputi:
    - a. Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat;
    - b. Indikator 5, Aturan Tertulis yang Membatasi Kebebasan atau Mengharuskan Masyarakat dalam Menjalankan Agamanya;
    - c. Indikator 8, Aturan tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender Etnis, atau Terhadap Kelompok Rentan lainnya;
    - d. Indikator 10, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat karena Alasan Gender, Etnis atau terhadap Kelompok Rentan lainnya;
    - e. Indikator 12, Kejadian yang Menunjukkan Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas Sehingga Kelompok Penyandang Cacat tidak dapat Menggunakan Hak Memilih;
    - f. Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
    - g. Indikator 14, Persentase Penduduk yang Menggunakan Hak Pilih dibandingkan dengan yang Memiliki Hak untuk Memilih dalam Pemilu (*voters turnout*);
    - h. Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif;
    - i. Indikator 25, Jumlah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN.

- Terdapat 5 indikator yang berada pada kinerja kategori “buruk” (skor di bawah 60), meliputi:
  - a. Indikator 6, Tindakan atau Pernyataan Pejabat Pemerintah yang Membatasi Kebebasan atau mengharuskan Masyarakat untuk Menjalankan Ajaran Agamanya;
  - b. Indikator 16, Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan;
  - c. Indikator 21, Persentase Jumlah Perda yang Berasal dari Hak Inisiatif DPRD terhadap Jumlah Total Perda yang dihasilkan;
  - d. Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah;
  - e. Indikator 28, Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi.

Dari 5 Indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik di tahun mendatang.

## 5. Perkembangan IDI Menurut Provinsi Tahun 2017

Terdapat empat provinsi yang berkategori “baik”. Posisi pertama ditempati oleh DKI Jakarta yang naik dari 70,85 pada 2016 menjadi 84,73 pada 2017. Tiga provinsi lainnya adalah DI Yogyakarta sebesar 83,61, Kalimantan Utara sebesar 81,06, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 80,11. Sementara 30 provinsi lainnya berada dalam kategori “sedang” (lihat Lampiran 3).

Meskipun demikian, dibandingkan tahun 2016, nilai IDI di 16 provinsi mengalami penurunan. Penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang turun 6,98 poin dari 82,49 pada 2016 menjadi 75,51 pada 2017. Provinsi lainnya yang juga menurun cukup tajam adalah Provinsi Sumatera Selatan yang turun 6,91 poin dari 80,95 pada 2016 menjadi 74,04 pada 2017.

## Penjelasan teknis

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama *stakeholder* lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, IDI juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak hanya pemerintah saja.

**Tabel 1**  
**Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2017**

Aspek	Variabel	Indikator*)
• Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
• Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
• Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Catatan : \*) = rincian indikator dapat dilihat pada Lampiran 2

Pengumpulan data IDI menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama, data kuantitatif dikumpulkan dari coding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *Focus Group Discussion (FGD)* sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di coding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni **pertama**, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; **kedua**, menghitung indeks provinsi; dan **ketiga**, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI. Selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Indeks komposit ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya indeks komposit provinsi menentukan IDI Nasional.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

### Lampiran 1 Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Riau, 2016 - 2017

No	Nama Variabel	2016	2017	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	97,66	100,00	2,34
2	Kebebasan Berpendapat	39,59	93,74	54,15
3	Kebebasan Berkeyakinan	77,69	78,96	1,27
4	Kebebasan dari Diskriminasi	60,80	78,68	17,88
5	Hak Memilih dan Dipilih	75,53	75,53	0
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	80,43	57,61	-22,82
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	91,14	91,14	0
8	Peran DPRD	47,96	77,06	29,10
9	Peran Partai Politik	99,22	100,00	0,78
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	35,85	58,70	22,85
11	Peran Peradilan yang Independen	50,00	50,00	0

Sumber : Diolah dari Data Survei Indeks Demokrasi Indonesia 2017



## Lampiran 2 Perkembangan Skor Indikator 2016 dan 2017

Nomor	Indikator	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kebebasan Sipil Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	81,25	100,00
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	37,50	100,00
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	50,00	62,50
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	78,26	78,26
6	Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	62,50	50,00
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	85,00	100,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	0,00	66,67
9	Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100,00	100,00
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok Hak-Hak Politik	100,00	75,00
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	97,44	97,44
12	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	60,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	68,82	68,82
14	Voters turnout	69,48	69,48
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	92,31	92,31
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	60,87	15,22
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Lembaga Demokrasi	100,00	100,00
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	82,28	82,28
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	66,80	86,05
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	25,00	50,00
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	0,00	67,86
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100,00	100,00
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	92,15	100,00
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	28,95	78,95
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	41,66	41,66
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	0,00	0,00

Sumber : Diolah dari Data Survei Indeks Demokrasi Indonesia 2017

### Lampiran 3

## Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2016-2017

Provinsi	IDI 2016				IDI 2017				
	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Rank	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	72,48	92,92	63,94	60,33	70,93	22	87,27	63,94	61,47
Sumatera Utara	67,37	82,71	62,29	56,13	68,08	31	74,75	62,29	68,87
Sumatera Barat	54,41	51,01	54,33	58,82	69,50	28	61,66	61,08	92,72
Riau	71,89	71,78	77,98	62,34	73,41	18	82,03	66,57	73,41
Jambi	68,89	84,39	65,63	54,58	74,12	14	86,81	62,08	77,27
Sumatera Selatan	80,95	91,17	81,94	66,53	74,04	15	90,83	63,90	69,03
Bengkulu	74,23	85,14	63,84	77,01	72,73	20	88,51	59,42	74,03
Lampung	61,00	60,49	59,32	64,31	72,01	21	74,12	67,20	77,00
Kep. Bangka Belitung	83,00	87,65	81,09	80,20	80,11	4	83,07	82,30	72,89
Kepulauan Riau	72,84	85,43	71,28	59,48	76,33	8	90,84	71,45	65,82
DKI Jakarta	70,85	81,11	67,54	63,19	84,73	1	87,73	80,86	87,12
Jawa Barat	66,82	73,37	72,34	49,79	68,78	29	73,61	71,02	59,16
Jawa Tengah	66,71	66,06	67,24	66,69	70,85	24	69,07	67,24	78,82
D.I.Yogyakarta	85,58	90,00	81,59	86,37	83,61	2	93,25	82,31	73,55
Jawa Timur	72,24	73,73	76,49	63,63	70,92	23	78,98	60,98	76,57
Banten	71,36	83,47	68,30	60,99	73,72	17	85,16	63,87	74,98
Bali	78,95	96,94	69,60	71,18	78,80	6	95,51	66,80	76,85
Nusa Tenggara Barat	65,41	65,06	62,08	71,13	76,04	11	79,40	62,08	93,98
Nusa Tenggara Timur	82,49	96,25	81,68	66,46	75,51	13	79,69	69,75	79,39
Kalimantan Barat	75,28	83,29	75,70	64,54	79,13	5	97,15	76,36	60,85
Kalimantan Tengah	74,77	84,98	70,66	68,43	76,12	10	95,58	56,69	82,50
Kalimantan Selatan	73,43	61,04	83,58	72,89	76,25	9	60,16	81,09	88,79
Kalimantan Timur	73,64	78,25	78,35	60,36	72,86	19	83,33	67,18	68,72
Kalimantan Utara	76,98	100,00	66,64	64,48	81,06	3	98,57	68,54	78,93
Sulawesi Utara	76,34	96,31	70,42	60,62	75,76	12	90,87	72,12	62,54
Sulawesi Tengah	72,20	80,39	67,89	68,76	69,79	27	90,04	55,88	66,44
Sulawesi Selatan	68,53	75,54	61,51	70,86	70,79	25	77,48	64,58	72,23
Sulawesi Tenggara	71,13	88,07	55,51	74,66	68,51	30	77,66	60,49	69,74
Gorontalo	77,48	82,35	75,54	74,42	73,92	16	85,30	68,18	68,73
Sulawesi Barat	72,37	82,89	69,02	64,47	67,74	32	73,56	60,84	71,39
Maluku	78,20	87,17	76,18	70,13	77,45	7	81,78	74,85	76,15
Maluku Utara	73,27	92,27	61,79	67,59	70,73	26	90,19	65,84	54,02
Papua Barat	60,35	93,67	38,05	53,85	62,76	33	92,42	39,05	63,14
Papua	61,02	92,15	41,13	53,45	61,34	34	89,09	42,16	56,91
<b>INDONESIA</b>	<b>70,09</b>	<b>76,45</b>	<b>70,11</b>	<b>62,05</b>	<b>72,11</b>		<b>78,75</b>	<b>66,63</b>	<b>72,49</b>

Sumber : Diolah dari Data Survei Indeks Demokrasi Indonesia 2017

Diterbitkan oleh:



**Badan Pusat Statistik  
Provinsi Riau**  
Jl. Pattimura No. 12 Pekanbaru-Riau 28131



**Ka.BPS Provinsi Riau : Ir. Aden Gultom, MM**  
Up.Kabid Statistik Sosial : Ahmad Azhari, S.Si  
Telepon: (0761) 23042-21336  
E-mail: azhari@bps.go.id  
Website: www.bps.go.id



Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.